BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN & INFORMASI KEPEGAWAIAN

BUKU STATISTIK ASN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
2023

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi
Sub Bidang Data dan Informasi

Terbitan Ke
Edisi Desember 2023
No. ISSN : 2406-8004

Pembina :	Penanggungjawab :	Koordinator :
Asri, SH., M.Si	Syarifuddin, S.Sos., M.A.P	Ratna, S.Sos

Tim Pendukung :

Djafar	Dwi Astuty, S.AP	Ince Rahayu, SE
Nuryadin	Suparti	Fitrianingsih
Fernando Kekung, S.Kom	Widya Sagita, S.Kom	Ary Syaputra

Diizinkan mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan menyebut sumbernya.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Gubernur Sulawesi Tengah

H. Rudsy Mastura

Wakil Gubernur

Drs. Ma'mun Amir

V i s i :

"**Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**"

M i s i :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum, dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia (HAM);
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di Dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan Dijalankan secara Sistematis dan Digital; dan
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Visi :

"Sebagai Garda Terdepan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Bersih, Berwibawa Dan Profesional"

Misi :

1. Melakukan Pembenahan Dan Penyempurnaan Sistem Manajemen Aparatur;
2. Melakukan Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Dan Orientasi Capaian Kinerja;
3. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Kepegawaian;
4. Melakukan Pembenahan Reformasi Birokrasi Pada Aspek Pengelolaan SDM Aparatur Untuk Mewujudkan Sulawesi Tengah Sejajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.

SAMBUTAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Asri, SH., M.Si.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas kembali terbitnya Buku Statistik PNS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang berisikan profil kepegawaian Provinsi Sulawesi Tengah. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada bidang Formasi Pengadaan dan Informasi Kepegawaian sebagai unit kerja yang membidangi rilisnya buku ini. Semoga semua usaha dan niat tersebut bernilai ibadan dan pahala dari Allah SWT.

Data, angka dan informasi kepegawaian yang terangkum dalam bentuk Buku Statistik Kepegawaian semacam ini merupakan suatu hal penting yang perlu secara terjadwal hadir dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Buku ini bertujuan untuk menyediakan bahan atau sumber yang dapat diolah dan diubah ke dalam bentuk informasi kepegawaian yang dapat membantu kalangan internal pemerintahan dan pengambil kebijakan bidang kepegawaian. Karena itu, penerbitan Buku ini adalah suatu upaya yang efektif menunjukkan eksistensi pemerintah ditengah masyarakat. Sekaligus juga sebagai bahan atau sumber jawaban atas semakin besarnya tuntutan publik akan keterbukaan informasi.

Buku Statistik Kepegawaian ini harus bisa hadir secara rutin dan dalam jumlah cetakan yang memadai. Tentunya dengan tetap melakukan evaluasi bagi perbaikan dan penyempurnaan dimasa akan datang. Akurasi dan variasi data, ragam gambar dan hal lainnya, perlu terus ditingkatkan kualitasnya sehingga Buku ini bisa semakin bernilai dan menarik. Demikian semoga Buku Statistik PNS Provinsi Sulawesi Tengah 2023 ini bermanfaat bagi Kita semua.

BAB 1
Keadaan PNS
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

1. PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	URAIAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		PRIA	%	WANITA	%	
1	PROV. SULAWESI TENGAH	**6.312**	44,68%	**7.814**	55,32 %	**14.126**

2. PNS Perperangkat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	48	45	93
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	33	13	46
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	37	39	76
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	143	125	268
5	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	29	31	60
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	70	66	136
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	39	38	77
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	15	20	35
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	78	72	150
10	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	17	29	46

11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	22	26	48
12	BIRO PEREKONOMIAN	18	18	36
13	BIRO ADM. PEMBANGUNAN	18	15	33
14	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	15	19	34
15	BIRO HUKUM	17	12	29
16	BIRO ORGANISASI	18	28	46
17	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	15	17	32
18	BIRO UMUM	85	56	141
19	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	134	46	180
20	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI	154	70	224
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI	60	37	97
22	DINAS KEBUDAYAAN	49	34	83
23	DINAS KEHUTANAN PROVINSI	308	124	432
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	101	66	167
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI	22	21	43
26	DINAS KESEHATAN PROVINSI	86	203	289
27	DINAS KOMUNIKASI, INORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK PROVINSI	30	23	53
28	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI	31	42	73
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	23	30	53
30	DINAS PANGAN PROVINSI	20	38	58
31	DINAS PARIWISATA PROVINSI	26	31	57

32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI	35	29	64
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI	15	54	69
34	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI	49	30	79
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	40	60	100
36	DINAS PENDIDIKAN	3200	4508	7708
37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI	8	49	57
38	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI	65	34	99
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI	45	45	90
40	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI	118	79	197
41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI	45	54	99
42	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI	37	25	62
43	DINAS SOSIAL PROVINSI	67	89	156
44	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI	164	115	279
45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI	91	54	145
46	INSPEKTORAT DAERAH	54	54	108
47	RUMAH SAKIT MADANI PALU	174	342	516
48	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA	208	696	904
49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI	84	8	92
50	SEKRETARIAT DAERAH	5	2	7
51	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	47	53	100
TOTAL		**6.312**	**7.814**	**14.126**

3. PNS Perperangkat Daerah Berdasarkan Jenis Jabatan

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PNS JENIS JABATAN												TOTAL
		STRUKTURAL (Ess I - IV)			FUNGSIONAL			PELAKSANA			PPPK			
		P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	5	11	12	6	18	29	32	61	1	2	3	93
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	6	2	8	2	1	3	25	10	35			0	46
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	2	7	4	1	5	26	32	58	2	4	6	76
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	36	23	59	2	3	5	105	99	204			0	268
5	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	3	5	8	6	5	11	16	16	32	4	5	9	60
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	7	15	1	2	3	61	56	117		1	1	136
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	6	1	7	9	14	23	23	22	45	1	1	2	77
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	1	4	5			0	14	16	30			0	35
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5	3	8	6	5	11	67	64	131			0	150
10	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	5	8	13			0	12	21	33			0	46
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	11	2	13	5	5	10	6	19	25			0	48
12	BIRO PEREKONOMIAN	6	7	13			0	12	11	23			0	36
13	BIRO ADM. PEMBANGUNAN	8	5	13			0	10	9	19		1	1	33
14	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	8	5	13			0	7	14	21			0	34
15	BIRO HUKUM	7	6	13			0	7	6	13	3		3	29
16	BIRO ORGANISASI	4	9	13			0	11	13	24	3	6	9	46
17	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	5	8	13			0	10	9	19			0	32

18	BIRO UMUM	8	5	13			0	77	51	128			0	141
19	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	14	6	20	3		3	117	40	157			0	180
20	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI	13	16	29	3	1	4	136	51	187	2	2	4	224
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI	17	12	29	6	4	10	37	21	58			0	97
22	DINAS KEBUDAYAAN	9	3	12	2	1	3	36	29	65	2	1	3	83
23	DINAS KEHUTANAN PROVINSI	51	12	63	121	29	150	110	70	180	26	13	39	432
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	32	16	48	9	4	13	49	37	86	11	9	20	167
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI	5	2	7	6	2	8	11	17	28			0	43
26	DINAS KESEHATAN PROVINSI	7	21	28	18	54	72	60	118	178	1	10	11	289
27	DINAS KOMUNIKASI, INORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK PROVINSI	5	3	8	10	3	13	14	17	31	1		1	53
28	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI	6	5	11	3	4	7	18	22	40	4	11	15	73
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	5	4	9	4	5	9	14	21	35			0	53
30	DINAS PANGAN PROVINSI	5	6	11	6	4	10	9	28	37			0	58
31	DINAS PARIWISATA PROVINSI	1	7	8	4	6	10	21	18	39			0	57
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARTAKAT DAN DESA PROVINSI	5	3	8	9	2	11	21	24	45			0	64
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI	3	9	12	2	6	8	10	39	49			0	69
34	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI	5	3	8	9	3	12	35	24	59			0	79
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	4	7	11	4	11	15	15	20	35	17	22	39	100

36	DINAS PENDIDIKAN	20	13	33	1851	2374	4225	223	285	508	1106	1836	2942	7708
37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI	1	4	5	1	1	2	6	44	50			0	57
38	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI	15	2	17	2	1	3	48	31	79			0	99
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI	9	10	19	5	12	17	31	23	54			0	90
40	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI	13	15	28	20	19	39	83	42	125	2	3	5	197
41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI	5	5	10	9	27	36	31	22	53			0	99
42	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI	5	4	9	7	5	12	24	15	39	1	1	2	62
43	DINAS SOSIAL PROVINSI	9	10	19	8	4	12	47	74	121	3	1	4	156
44	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI	10	12	22	56	29	85	91	68	159	7	6	13	279
45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI	20	11	31	21	15	36	50	28	78			0	145
46	INSPEKTORAT DAERAH	6	2	8	37	41	78	11	11	22			0	108
47	RUMAH SAKIT MADANI PALU	4	6	10	67	188	255	28	22	50	75	126	201	516
48	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA	5	7	12	138	518	656	30	67	97	35	104	139	904
49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI	16	3	19	21	2	23	47	3	50			0	92
50	SEKRETARIAT DAERAH	5	2	7			0			0			0	7
51	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI		5	5		5	5	47	43	90			0	100
T O T A L		**468**	**353**	**821**	**2.509**	**3.422**	**5.931**	**2.028**	**1.874**	**3.902**	**1.307**	**2.165**	**3.472**	**14.126**

Rekap PNS Berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Uraian	Jenis Kelamin				Jumlah
		Pria	%	Wanita	%	
1	Struktural	468	3,31%	353	2,50%	821
2	Fungsional	2509	17,76%	3422	24,22%	5931
3	Pelaksana	2028	58,41%	1874	53,97%	3902
4	PPPK	1307	9,25%	2165	15,33%	3472
Total		**6.312**	**30,33%**	**7.814**	**42,05%**	**14.126**

4. PNS Perperangkat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang PNS

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	GOLONGAN RUANG												JUMLAH
		I			II			III			IV			
		P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	0	11	4	15	31	35	66	5	4	9	90
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	0	0	0	10	2	12	14	9	23	9	2	11	46
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	10	4	14	15	30	45	10	1	11	70
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	44	23	67	84	87	171	15	15	30	268
5	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1	0	1	7	4	11	11	17	28	6	5	11	51
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	17	2	19	49	56	105	4	7	11	135
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0	0	0	4	3	7	20	20	40	14	14	28	75
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	2	0	2	7	1	8	4	15	19	2	4	6	35
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0	13	11	24	56	53	109	9	8	17	150
10	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	0	0	3	1	4	12	24	36	2	4	6	46
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	0	0	2	1	3	13	22	35	7	3	10	48
12	BIRO PEREKONOMIAN	0	0	0	3	2	5	12	10	22	3	6	9	36
13	BIRO ADM. PEMBANGUNAN	0	0	0	4	2	6	10	10	20	4	2	6	32
14	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0	0	0	2	0	2	10	19	29	3	0	3	34
15	BIRO HUKUM	0	0	0	2	0	2	10	7	17	2	5	7	26
16	BIRO ORGANISASI	0	0	0	3	1	4	11	17	28	1	4	5	37
17	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI	0	0	0	2	0	2	9	12	21	4	5	9	32

	DAERAH													
18	BIRO UMUM	5	0	5	29	15	44	46	40	86	5	1	6	141
19	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	1	0	1	26	3	29	97	38	135	10	5	15	180
20	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI	4	0	4	51	3	54	91	53	144	6	12	18	220
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI	0	0	0	8	2	10	42	31	73	10	4	14	97
22	DINAS KEBUDAYAAN	0	0	0	10	5	15	31	25	56	6	3	9	80
23	DINAS KEHUTANAN PROVINSI	2	0	2	55	9	64	189	92	281	36	10	46	393
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	1	0	1	13	4	17	58	43	101	18	10	28	147
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI	1	0	1	4	4	8	13	13	26	4	4	8	43
26	DINAS KESEHATAN PROVINSI	0	0	0	15	9	24	52	128	180	18	56	74	278
27	DINAS KOMUNIKASI, INORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK PROVINSI	0	0	0	1	6	7	22	14	36	6	3	9	52
28	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI	0	0	0	4	3	7	15	22	37	8	6	14	58
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	0	0	0	3	2	5	12	21	33	8	7	15	53
30	DINAS PANGAN PROVINSI	0	0	0	1	1	2	11	28	39	8	9	17	58
31	DINAS PARIWISATA PROVINSI	0	0	0	4	0	4	17	23	40	5	8	13	57
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARTAKAT DAN DESA PROVINSI	0	0	0	5	0	5	20	20	40	10	9	19	64
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI	0	0	0	1	1	2	9	40	49	5	13	18	69
34	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI	0	0	0	8	4	12	33	22	55	8	4	12	79

35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	0	0	0	5	0	5	12	26	38	6	12	18	61
36	DINAS PENDIDIKAN	4	2	6	111	100	211	899	1234	2133	1080	1336	2416	4766
37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI	1	0	1	1	2	3	5	42	47	1	5	6	57
38	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI	0	0	0	19	12	31	39	20	59	7	2	9	99
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI	0	0	0	2	1	3	35	37	72	8	7	15	90
40	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI	0	0	0	21	4	25	73	45	118	22	27	49	192
41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI	0	0	0	16	3	19	20	40	60	9	11	20	99
42	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI	0	0	0	2	2	4	26	16	42	8	6	14	60
43	DINAS SOSIAL PROVINSI	0	0	0	26	20	46	27	60	87	11	8	19	152
44	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI	0	0	0	36	12	48	93	83	176	28	14	42	266
45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI	1	0	1	17	5	22	59	36	95	14	13	27	145
46	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	4	0	4	33	33	66	17	21	38	108
47	RUMAH SAKIT MADANI PALU	5	1	6	30	36	66	49	142	191	15	37	52	315
48	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA	2	1	3	24	60	84	101	400	501	46	131	177	765
49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI	3	0	3	36	0	36	36	6	42	9	2	11	92
50	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	7
51	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	0	0	0	15	0	15	32	44	76	0	9	9	100
T O T A L		**33**	**4**	**37**	**747**	**389**	**1136**	**2668**	**3360**	**6028**	**1557**	**1896**	**3453**	**10654**

No.	Golongan Ruang	Jenis Kelamin				Jumlah
		Pria	%	Wanita	%	
1	I	33	0,31%	4	0,04%	37
2	II	747	7,01%	389	3,65%	1136
3	III	2668	25,04%	3360	31,54%	6028
4	IV	1557	14,61%	1896	17,80%	3453
Total		**5.005**	**46,98%**	**5.649**	**53,02%**	**10.654**

Golongan Ruang PPPK

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	GOLONGAN RUANG PPPK									JUMLAH
		V			IX			X			
		P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	0	1	2	3	-	-	0	3
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	0	2	4	6	-	-	0	6
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
5	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-	0	2	4	6	2	1	3	9
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	0	-	1	1	-	-	0	1
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	-	0	1	1	2	-	-	0	2
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
10	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
12	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
13	BIRO ADM. PEMBANGUNAN	-	-	0	-	1	1	-	-	0	1
14	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
15	BIRO HUKUM	-	-	0	3	-	3	-	-	0	3
16	BIRO ORGANISASI	-	-	0	3	6	9	-	-	0	9
17	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
18	BIRO UMUM	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
19	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
20	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI	-	-	0	2	2	4	-	-	0	4
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0

22	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	0	2	1	3	-	-	0	3
23	DINAS KEHUTANAN PROVINSI	4	1	5	22	12	34	-	-	0	39
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	-	-	0	11	9	20	-	-	0	20
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
26	DINAS KESEHATAN PROVINSI	1	4	5	-	5	5	-	1	1	11
27	DINAS KOMUNIKASI, INORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK PROVINSI	-	-	0	1	-	1	-	-	0	1
28	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI	-	-	0	4	11	15	-	-	0	15
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
30	DINAS PANGAN PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
31	DINAS PARIWISATA PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARTAKAT DAN DESA PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
34	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	-	-	0	17	22	39	-	-	0	39
36	DINAS PENDIDIKAN	-	-	0	1106	1836	2942	-	-	0	2942
37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
38	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
40	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI	-	-	0	2	3	5	-	-	0	5
41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0

42	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI	-	-	0	1	1	2	-	-	0	2
43	DINAS SOSIAL PROVINSI	-	-	0	3	1	4	-	-	0	4
44	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI	-	-	0	7	6	13	-	-	0	13
45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
46	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
47	RUMAH SAKIT MADANI PALU	63	104	167	1	6	7	11	16	27	201
48	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA	17	46	63	-	19	19	18	39	57	139
49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
50	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
51	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
T O T A L		**85**	**155**	**240**	**1191**	**1953**	**3144**	**31**	**57**	**88**	**3472**

5. PNS Perperangkat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan PNS

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDIDIKAN PNS									JUMLAH
		PENDIDIKAN DASAR (SD - SMA)			PENDIDIKAN DIPLOMA			PENDIDIKAN TINGGI (S1 - S3)			
		P	W	JMLH	P	W	JMLH	P	W	JMLH	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	13	4	17	3	2	5	31	37	68	90
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	11	3	14	1	0	1	21	10	31	46
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12	6	18	1	2	3	22	27	49	70
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	49	24	73	1	4	5	93	97	190	268
5	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	10	6	16	0	3	3	15	17	32	51
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19	3	22	0	2	2	51	60	111	135
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	6	5	11	0	0	0	32	32	64	75
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	10	2	12	0	1	1	5	17	22	35
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21	14	35	0	0	0	57	58	115	150
10	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	4	3	7	0	0	0	13	26	39	46
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	3	1	4	0	0	0	19	25	44	48
12	BIRO PEREKONOMIAN	4	2	6	0	0	0	14	16	30	36
13	BIRO ADM. PEMBANGUNAN	3	4	7	2	0	2	13	10	23	32

14	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	2	1	3	0	0	0	13	18	31	34
15	BIRO HUKUM	2	0	2	0	2	2	12	10	22	26
16	BIRO ORGANISASI	4	1	5	0	0	0	11	21	32	37
17	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2	1	3	0	1	1	13	15	28	32
18	BIRO UMUM	40	21	61	1	0	1	44	35	79	141
19	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	46	8	54	7	1	8	81	37	118	180
20	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI	70	3	73	9	6	15	73	59	132	220
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI	10	3	13	0	3	3	50	31	81	97
22	DINAS KEBUDAYAAN	17	8	25	0	1	1	30	24	54	80
23	DINAS KEHUTANAN PROVINSI	93	12	105	2	2	4	187	97	284	393
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	15	4	19	1	2	3	74	51	125	147
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI	6	4	10	0	0	0	16	17	33	43
26	DINAS KESEHATAN PROVINSI	15	10	25	16	28	44	54	155	209	278
27	DINAS KOMUNIKASI, INORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK PROVINSI	3	8	11	1	1	2	25	14	39	52
28	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI	6	5	11	1	0	1	20	26	46	58
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	5	2	7	0	0	0	18	28	46	53
30	DINAS PANGAN PROVINSI	2	2	4	0	1	1	18	35	53	58

31	DINAS PARIWISATA PROVINSI	8	0	8	2	0	2	16	31	47	57
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARTAKAT DAN DESA PROVINSI	6	0	6	1	0	1	28	29	57	64
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI	1	2	3	0	5	5	14	47	61	69
34	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI	13	7	20	0	0	0	36	23	59	79
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	5	3	8	0	1	1	18	34	52	61
36	DINAS PENDIDIKAN	87	80	167	15	18	33	1992	2574	4566	4766
37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI	2	2	4	0	11	11	6	36	42	57
38	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI	27	17	44	6	7	13	32	10	42	99
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI	3	1	4	2	2	4	40	42	82	90
40	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI	43	8	51	0	0	0	73	68	141	192
41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI	16	7	23	2	6	8	27	41	68	99
42	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI	2	2	4	2	1	3	32	21	53	60
43	DINAS SOSIAL PROVINSI	29	27	56	1	2	3	34	59	93	152
44	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI	56	19	75	0	0	0	101	90	191	266

45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI	21	6	27	3	5	8	67	43	110	145
46	INSPEKTORAT DAERAH	6	1	7	2	0	2	46	53	99	108
47	RUMAH SAKIT MADANI PALU	14	9	23	44	106	150	41	101	142	315
48	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA	24	40	64	53	205	258	96	347	443	765
49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI	49	0	49	0	0	0	35	8	43	92
50	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	0	0	5	2	7	7
51	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	15	4	19	1	0	1	31	49	80	100
TOTAL		**930**	**405**	**1335**	**180**	**431**	**611**	**3895**	**4813**	**8708**	**10654**

No.	Uraian	Jenis Kelamin				Jumlah
		Pria	%	Wanita	%	
1	DASAR	930	8,73%	405	3,80%	1335
2	DIPLOMA	180	1,69%	431	4,05%	611
3	TINGGI	3895	36,56%	4813	45,18%	8708
Total		**5.005**	**46,98%**	**5.649**	**53,02%**	**10.654**

Jenjang Pendidikan PPPK

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENDIDIKAN PPPK									JUMLAH
		PENDIDIKAN DASAR (SD - SMA)			PENDIDIKAN DIPLOMA			PENDIDIKAN TINGGI (S1 - S3)			
		P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	0	-	-	0	1	2	3	3
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	0	-	-	0	2	4	6	6
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
5	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-	0	-	-	0	4	5	9	9
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	0	-	-	0	-	1	1	1
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	-	0	-	-	0	1	1	2	2
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
10	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
12	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
13	BIRO ADM. PEMBANGUNAN	-	-	0	-	-	0	-	1	1	1
14	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
15	BIRO HUKUM	-	-	0	-	-	0	3	-	3	3
16	BIRO ORGANISASI	-	-	0	-	-	0	3	6	9	9
17	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0

18	BIRO UMUM	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
19	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
20	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI	-	-	0	-	-	0	2	2	4	4
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
22	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	0	-	-	0	2	1	3	3
23	DINAS KEHUTANAN PROVINSI	-	-	0	4	1	5	22	12	34	39
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	-	-	0	-	-	0	11	9	20	20
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
26	DINAS KESEHATAN PROVINSI	-	-	0	1	4	5	-	6	6	11
27	DINAS KOMUNIKASI, INORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK PROVINSI	-	-	0	-	-	0	1	-	1	1
28	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI	-	-	0	-	-	0	4	11	15	15
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
30	DINAS PANGAN PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
31	DINAS PARIWISATA PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARTAKAT DAN DESA PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
34	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	-	-	0	-	-	0	17	22	39	39

	PINTU PROVINSI										
36	DINAS PENDIDIKAN	-	-	0	-	-	0	1.106	1.836	2942	2942
37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
38	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
40	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI	-	-	0	-	-	0	2	3	5	5
41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
42	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI	-	-	0	-	-	0	1	1	2	2
43	DINAS SOSIAL PROVINSI	-	-	0	-	-	0	3	1	4	4
44	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI	-	-	0	-	-	0	7	6	13	13
45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
46	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
47	RUMAH SAKIT MADANI PALU	-	-	0	63	104	167	12	22	34	201
48	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA	-	-	0	17	46	63	18	58	76	139
49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
50	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
51	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**85**	**155**	**240**	**1222**	**2010**	**3232**	**3472**

6. Keadaan / Formasi Jabatan Struktural (non KTU SMA/SMK)

NO.	NAMA INSTANSI	FORMASI JABATAN STRUKTURAL				TOTAL	JENIS KELAMIN PEJABAT STRUKTURAL PER ESELON												TOTAL	FORMASI JABATAN STRUKTURAL KOSONG				TOTAL
							I			II			III			IV								
		I	II	III	IV		P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML		I	II	III	IV	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	1	5	5	11	-	-	-	1	-	1	3	2	5	2	3	5	11	-				-
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	-	1	5	2	8	-	-	-	1	-	1	4	1	5	1	1	2	8	-	-	-	-	-
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1	4	2	7	-	-	-	1	-	1	4		4		2	2	7	-	-	-	-	-
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	1	16	42	59	-	-	-	1	-	1	11	5	16	24	18	42	59	-	-	-	-	-
5	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	-	1	5	3	9	-	-	-	-	1	1	2	3	5	1	1	2	8	-	-	-	1	1
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	1	5	9	15	-	-	-	1	-	1	2	3	5	5	4	9	15	-	-	-	-	-
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	1	4	2	7	-	-	-	1	-	1	4	-	4	1	1	2	7	-	-	-	-	-
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	-	1	4	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	4	5	-	-	-	-	-
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	1	5	2	8	-	-	-	-	1	1	5	-	5	-	2	2	8	-	-	-	-	-
10	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	1	2	3	3	6	9	13	-	-	-	-	-
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	2	1	3	8	1	9	13	-	-	-	-	-
12	BIRO PEREKONOMIAN	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	-	3	3	5	4	9	13	-	-	-	-	-
13	BIRO ADM. PEMBANGUNAN	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	3	-	3	4	5	9	13	-	-	-	-	-
14	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	3	-	3	4	5	9	13	-	-	-	-	-
15	BIRO HUKUM	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	2	1	3	4	5	9	13	-	-	-	-	-
16	BIRO ORGANISASI	-	1	3	9	13	-	-	-	-	1	1	-	3	3	4	5	9	13	-	-	-	-	-
17	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	2	1	3	2	7	9	13	-	-	-	-	-
18	BIRO UMUM	-	1	3	9	13	-	-	-	1	-	1	3	-	3	4	5	9	13	-	-	-	-	-

19	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	-	1	6	14	21	-	-	-	1	-	1	4	1	5	9	5	14	20	-	-	1	-	1
20	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI	-	1	8	20	29	-	-	-	1	-	1	3	5	8	9	11	20	29	-	-	-	-	-
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI	-	1	11	20	32	-	-	-	1	-	1	4	5	9	12	7	19	29	-	-	2	1	3
22	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI	-	1	5	6	12	-	-	-	1	-	1	4	1	5	4	2	6	12	-	-	-	-	-
23	DINAS KEHUTANAN PROVINSI	-	1	19	44	64	-	-	-	1	-	1	18	1	19	32	11	43	63	-	-	-	1	1
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	-	1	15	32	48	-	-	-	1	-	1	13	2	15	18	14	32	48	-	-	-	-	-
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI	-	1	4	2	7	-	-	-	1	-	1	2	2	4	2		2	7	-	-	-	-	-
26	DINAS KESEHATAN PROVINSI	-	1	8	19	28	-	-	-	1	-	1	1	7	8	5	14	19	28	-	-	-	-	-
27	DINAS KOMUNIKASI, INORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK PROVINSI	-	1	5	2	8	-	-	-	1	-	1	3	2	5	1	1	2	8	-	-	-	-	-
28	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI	-	1	5	5	11	-	-	-	1	-	1	4	1	5	1	4	5	11	-	-	-	-	-
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	-	1	4	4	9	-	-	-	1	-	1	3	1	4	1	3	4	9	-	-	-	-	-
30	DINAS PANGAN PROVINSI	-	1	5	5	11	-	-	-	1	-	1	2	3	5	2	3	5	11	-	-	-	-	-
31	DINAS PARIWISATA PROVINSI	-	1	5	2	8	-	-	-	-	1	1	1	4	5		2	2	8	-	-	-	-	-
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI	-	1	5	2	8	-	-	-	1	-	1	3	2	5	1	1	2	8	-	-	-	-	-
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI	-	1	6	5	12	-	-	-	1	-	1		6	6	2	3	5	12	-	-	-	-	-
34	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI	-	1	5	2	8	-	-	-	1	-	1	2	3	5	2		2	8	-	-	-	-	-
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	-	1	7	3	11	-	-	-	1	-	1	2	5	7	1	2	3	11	-	-	-	-	-
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI	-	1	11	22	34	-	-	-	-	1	1	6	4	10	14	8	22	33	-	-	1	-	1
37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI	-	1	3	2	6	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	2	2	5	-	-	1	-	1
38	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI	-	1	5	11	17	-	-	-	1	-	1	5		5	9	2	11	17	-	-	-	-	-
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	-	1	8	12	21	-	-	-	1	-	1	5	3	8	3	7	10	19	-	-	-	2	2

	PERDAGANGAN PROVINSI																							
40	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI	-	1	10	17	28	-	-	-	-	1	1	6	4	10	7	10	17	28	-	-	-	-	-
41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI	-	1	6	3	10	-	-	-	1	-	1	2	4	6	2	1	3	10	-	-	-	-	-
42	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI	-	1	5	3	9	-	-	-	1	-	1	2	3	5	2	1	3	9	-	-	-	-	-
43	DINAS SOSIAL PROVINSI	-	1	8	11	20	-	-	-	-	1	1	5	2	7	4	7	11	19	-	-	1	-	1
44	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI	-	1	9	14	24	-	-	-	1	-	1	5	3	8	4	9	13	22	-	-	1	1	2
45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI	-	1	9	22	32	-	-	-	1	-	1	8	1	9	11	10	21	31	-	-	-	1	1
46	INSPEKTORAT DAERAH	-	1	5	2	8	-	-	-	1	-	1	4	1	5	1	1	2	8	-	-	-	-	-
47	RUMAH SAKIT MADANI PALU	-	-	4	7	11	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	4	6	10	-	-	-	1	1
48	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA	-	1	12	-	13	-	-	-	1	-	1	4	7	11	-	-	-	12	-	-	1	-	1
49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI	-	1	6	13	20	-	-	-	1	-	1	6	-	6	9	3	12	19	-	-	-	1	1
50	SEKRETARIAT DAERAH	1	6	-	-	7	-	1	1	5	1	6	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
51	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	-	1	3	1	5	-	-	-	-	1	1	-	3	3	-	1	1	5	-	-	-	-	-
T O T A L		**1**	**54**	**304**	**479**	**838**	**-**	**1**	**1**	**45**	**9**	**54**	**182**	**114**	**296**	**242**	**228**	**470**	**821**	**-**	**-**	**8**	**9**	**17**

Rekap Keadaan / Formasi PNS Jabatan Struktural (Eselon)

Jenjang	Ess.		Formasi	Jmlh Ess.	Ess. Terisi	Ess. Lowong	Jenis Kelamin Pejabat		
							P	W	Jumlah
Madya	I	I.b	1	1	1	0	-	1	1
Pratama	II	II.a	44	54	44	0	35	9	44
		II.b	10		10	0	9	1	10
Administrator	III	III.a	214	304	212	2	130	82	212
		III.b	90		84	6	52	32	84
Pengawas	IV	IV.a	477	479	468	9	241	227	468
		IV.b	2		2	0	1	1	2
			838	**838**	**821**	**17**	**468**	**353**	**821**

7. Keadaan Pendidikan PNS Pejabat Struktural

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENDIDIKAN PEJABAT STRUKTURAL																			TOTAL
		ESELON I				ESELON II				ESELON III					ESELON IV						
		S.I/ D.IV	S2	S3	JML	S.I/ D.IV	S2	S3	JML	D.I/ D.III	S.I/ D.IV	S2	S3	JML	SMA/ SMK	D.I/ D.III	S.I/ D.IV	S2	S3	JML	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	5	-	-	3	2	-	5	11
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	5	-	-	1	1	-	2	8
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	-	4	-	-	1	1	-	2	7
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	11	-	16	-	-	19	23	-	42	59
5	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	5	-	-	-	2	-	2	8
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	5	-	-	4	5	-	9	15
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	-	4	-	-	1	1	-	2	7
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	-	4	5
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	-	5	-	-	1	1	-	2	8
10	BIRO ADM. KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	3	-	-	5	4	-	9	13
11	BIRO PEGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	3	-	-	3	6	-	9	13
12	BIRO ADM. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	3	-	-	2	7	-	9	13
13	BIRO ADM. WILAYAH DAERAH DAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	3	-	-	7	2	-	9	13
14	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	7	3	-	10	13
15	BIRO HUKUM	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	3	-	1	4	4	-	9	13
16	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	-	-	5	4	-	9	13
17	BIRO OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	3	-	-	3	6	-	9	13
18	BIRO UMUM	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	3	-	-	3	6	-	9	13
19	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	5	-	1	5	8	-	14	20
20	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	8	-	8	-	-	11	9	-	20	29
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	4	-	9	1	-	14	4	-	19	29

22	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	5	-	-	2	4	-	6	12
23	DINAS KEHUTANAN PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8	11	-	19	-	-	34	9	-	43	63
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	12	-	15	-	-	21	11	-	32	48
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	4	-	-	1	1	-	2	7
26	DINAS KESEHATAN PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	6	-	8	-	-	8	11	-	19	28
27	DINAS KOMUNIKASI, INORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	5	-	-	1	1	-	2	8
28	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	5	-	-	3	2	-	5	11
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	4	-	-	3	1	-	4	9
30	DINAS PANGAN PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	5	-	-	2	3	-	5	11
31	DINAS PARIWISATA PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	5	-	-	2	-	-	2	8
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARTAKAT DAN DESA PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	5	-	-	-	2	-	2	8
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6	-	6	-	-	1	4	-	5	12
34	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	5	-	-	2	-	-	2	8
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	1	7	-	-	1	2	-	3	11
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	6	1	10	-	-	12	10	-	22	33
37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	-	1	1	-	2	5
38	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	5	-	-	9	2	-	11	17
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	-	8	-	-	5	5	-	10	19
40	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	9	-	10	-	-	4	13	-	17	28
41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	-	6	-	-	1	2	-	3	10
42	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	5	-	-	1	2	-	3	9
43	DINAS SOSIAL PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	1	7	-	-	9	2	-	11	19
44	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	6	1	8	-	-	6	7	-	13	22

45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	6	1	9	-	-	9	12	-	21	31
46	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	5	-	-	-	2	-	2	8
47	RUMAH SAKIT MADANI PALU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	3	3	-	6	10
48	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	10	1	11	-	-	-	-	-	-	12
49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	1	6	-	-	3	9	-	12	19
50	SEKRETARIAT DAERAH	-	1	-	1	-	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
51	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	3	-	-	1	-	-	1	5
TOTAL		**-**	**1**	**-**	**1**	**4**	**37**	**13**	**54**	**-**	**55**	**228**	**12**	**295**	**1**	**2**	**244**	**224**	**-**	**471**	**821**

Rekap Keadaan Pendidikan PNS Pejabat Struktural (Eselon)

No.	Jenjang Pendidikan	ESS.I	ESS.II	ESS.III	ESS.IV	Jumlah
1	SMA/SMK	-	-	-	1	1
2	D I - D III	-	-	-	2	2
3	S 1 / D IV	-	4	55	244	303
4	S 2	1	37	228	224	490
5	S 3	-	13	12	-	25
Total		**1**	**54**	**295**	**471**	**821**

8. Keadaan Diklat PIM PNS Pejabat Struktural Perperangkat Daerah

NO.	NAMA INSTANSI	FORMASI JABATAN STRUKTURAL				TOTAL	FORMASI JABATAN STRUKTURAL TERISI				TOTAL	BELUM PIM				JML
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	1	5	5	11		1	5	5	11		1	2	4	7
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	-	1	5	2	8		1	5	2	8		1	2	1	4
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1	4	2	7		1	4	2	7					0
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	1	16	42	59		1	16	42	59		1	8	33	42
5	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-	1	5	3	9		1	5	2	8			2		2
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	1	5	9	15		1	5	9	15		1	1		2
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	1	4	2	7		1	4	2	7			2	1	3
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	-	1	4	5			1	4	5					0
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	1	5	2	8		1	5	2	8				1	1
10	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	3	9	13		1	3	9	13		1	1	4	6
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	1	3	9	13		1	3	9	13		1		4	5
12	BIRO PEREKONOMIAN	-	1	3	9	13		1	3	9	13			1		1
13	BIRO ADM. PEMBANGUNAN	-	1	3	9	13		1	3	9	13		1		4	5
14	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	1	3	9	13		1	3	9	13			1	1	2
15	BIRO HUKUM	-	1	3	9	13		1	3	9	13		1	1	5	7
16	BIRO ORGANISASI	-	1	3	9	13		1	3	9	13					0
17	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	1	3	9	13		1	3	9	13					0
18	BIRO UMUM	-	1	3	9	13		1	3	9	13		1	3	6	10
19	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	-	1	6	14	21		1	5	14	20				6	6
20	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI	-	1	8	20	29		1	8	20	29		1	4	10	15
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI	-	1	11	20	32		1	9	19	29				14	14

22	DINAS KEBUDAYAAN	-	1	5	6	12		1	5	6	12		1	2	2	5
23	DINAS KEHUTANAN PROVINSI	-	1	19	44	64		1	19	43	63			10	29	39
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	-	1	15	32	48		1	15	32	48			3	26	29
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI	-	1	4	2	7		1	4	2	7		1	2	1	4
26	DINAS KESEHATAN PROVINSI	-	1	8	19	28		1	8	19	28			5	12	17
27	DINAS KOMUNIKASI, INORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK PROVINSI	-	1	5	2	8		1	5	2	8					0
28	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI	-	1	5	5	11		1	5	5	11			1	2	3
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	-	1	4	4	9		1	4	4	9		1	1	1	3
30	DINAS PANGAN PROVINSI	-	1	5	**5**	11		1	5	5	11			1	2	3
31	DINAS PARIWISATA PROVINSI	-	1	5	2	8		1	5	2	8			1	1	2
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI	-	1	5	2	8		1	5	2	8			2	1	3
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI	-	1	6	5	12		1	6	5	12					0
34	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI	-	1	5	2	8		1	5	2	8					0
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	-	1	7	3	11		1	7	3	11				1	1
36	DINAS PENDIDIKAN	-	1	11	22	34		1	10	22	33					0
37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI	-	1	3	2	6		1	2	2	5				1	1
38	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI	-	1	5	11	17		1	5	11	17		1	1	3	5
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI	-	1	8	12	21		1	8	10	19		1	6	5	12
40	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI	-	1	10	17	28		1	10	17	28					0
41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI	-	1	6	3	10		1	6	3	10					0
42	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI	-	1	5	3	9		1	5	3	9			1		1
43	DINAS SOSIAL PROVINSI	-	1	8	11	20		1	7	11	19			1	5	6
44	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI	-	1	9	14	24		1	8	13	22			4	6	10
45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI	-	1	9	22	32		1	9	21	31			1	11	12
46	INSPEKTORAT DAERAH	-	1	5	2	8		1	5	2	8					0
47	RUMAH SAKIT MADANI PALU	-	-	4	7	11			4	6	10			3	5	8

48	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA	-	1	12	-	13		1	11		12		1	9		10
49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI	-	1	6	13	20		1	6	12	19			2	7	9
50	SEKRETARIAT DAERAH	1	6	-	-	7	1	6			7					0
51	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	-	1	3	1	5		1	3	1	5			1	1	2
T O T A L		**1**	**54**	**304**	**479**	**838**	**1**	**54**	**296**	**470**	**821**	**0**	**16**	**85**	**216**	**317**

Rekap Keadaan DIKLAT PIM Pejabat Struktural

NO.	NAMA INSTANSI	FORMASI JABATAN STRUKTURAL				TOTAL	FORMASI JABATAN STRUKTURAL TERISI				TOTAL	BELUM PIM				TOTAL
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	PROVINSI SULAWESI TENGAH	**1**	**54**	**304**	**479**	**838**	**1**	**54**	**296**	**470**	**821**	**0**	**16**	**85**	**216**	**317**

9. Keadaan PNS Jabatan Fungsional

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN						TOTAL	KETERANGAN (INSTANSI)
		AHLI			TERAMPIL				
		P	W	JMLH AHLI	P	W	JMLH TERAMPIL		
PENDIDIKAN									
1	GURU	1811	2357	4168	0	0	0	4168	DINAS DIKBUD
2	PENGAWAS	34	12	46	0	0	0	46	DINAS DIKBUD
	SUB JUMLAH PENDIDIKAN	1845	2369	4214	0	0	0	4214	
KESEHATAN									
3	ADMINISTRATOR KESEHATAN	15	37	52	0	0	0	52	DINKES (28 ORANG), RSUD MADANI (4 ORANG), RSUD UNDATA (8 ORANG)
4	APOTEKER	9	27	36	8	29	37	73	RSUD UNDATA (47 ORANG), RSUD MADANI (28 ORANG),
5	BIDAN		52	52		69	69	121	RSUD UNDATA (100 ORANG), RSUD MADANI (20 ORANG)
6	DOKTER	30	65	95	0	0	0	95	RSUD UNDATA (66 ORANG), RSUD MADANI (28 ORANG)
7	ELEKTROMEDIS	0	1	1	2	1	3	4	RSUD UNDATA (2 ORANG), RSUD MADANI (2 ORANG)
8	EPIDEMIOLOG KESEHATAN	4	18	22	0	0	0	22	DINKES (13 ORANG), RSUD MADANI (2 ORANG), RSUD UNDATA (5 ORANG)
9	FISIOTERAPI	2	3	5	2	10	12	17	RSUD MADANI (5 ORANG), RSUD UNDATA (13 ORANG)
10	FISIKAWAN MEDIK	1	1	2	0	0	0	2	RSUD UNDATA (2 ORANG)
11	MEDIK VETERINER	2	4	6	0	0	0	6	DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN
12	NUTRISIONIS	2	18	20	0	8	8	28	RSUD UNDATA (18 ORANG), RSUD MADANI (10 ORANG)
13	OKUPASI TERAPI	0	0	0	1	1	2	2	RSUD UNDATA (1 ORANG), RSUD MADANI (1 ORANG)
14	ORTOTIK PROSTETIK	0	0	0	1	0	1	1	RSUD UNDATA (2 ORANG)
15	PENYULUH KESEHATAN	3	7	10	0	0	0	10	DINKES (10 ORANG), RSUD UNDATA (2 ORANG)
16	PERAWAT	35	121	156	69	218	287	443	DINKES (1 ORANG), RSUD UNDATA (313 ORANG), RSUD MADANI (136 ORANG)
17	PERAWAT GIGI	1	0	1	4	2	6	7	RSUD MADANI (2 ORANG), RSUD UNDATA (5 ORANG)
18	PEREKAM MEDIS	0	0	0	1	3	4	4	RSUD UNDATA (2 ORANG), RSUD MADANI (1 ORANG)
19	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	7	9	6	12	18	27	DINKES (9 ORANG), RSUD UNDATA (13 ORANG), RSUD MADANI (7 ORANG)

20	PSIKOLOG	2	4	6	0	0	0	6	RSUD UNDATA (2 ORANG), RSUD MADANI (3 ORANG), DP3A (1 ORANG)
21	RADIOGRAFER/RADIOLOGI	1	0	1	3	3	6	7	RSUD UNDATA (5 ORANG), RSUD MADANI (2 ORANG)
22	REFRAKSI OPTISION	0	0	0	1	0	1	1	RSUD MADANI (1 ORANG)
23	SANITARIAN	4	9	13	5	18	23	36	DINKES (5 ORANG), RSUD UNDATA (22 ORANG), RSUD MADANI (9 ORANG)
24	TEKNIK TRANSFUSI DARAH	0	0	0	3	2	5	5	RSUD MADANI (1 ORANG), RSUD UNDATA (4 ORANG)
25	TEKNISI GIGI	0	0	0	0	2	2	2	RSUD UNDATA (2 ORANG)
26	TERAPI WICARA	0	0	0	0	2	2	2	RSUD UNDATA (1 ORANG), RSUD MADANI (1 ORANG)
	SUB JUMLAH KESEHATAN	113	374	487	106	380	486	973	
TEKNIS LAINNYA									
27	ANALIS KEPEGAWAIAN	0	0	0	0	0	0	0	RSUD UNDATA (2 ORANG)
28	ADYATAMA KEPARIWISATAAN EKONOMI KREATIF	4	6	10	0	0	0	10	DISPAR
29	ANALIS AKUAKULTUR	1	0	1	0	0	0	1	DISKANLUT (1 ORANG)
30	ANALIS KEBIJAKAN	11	11	22	0	0	0	22	DPMPTSP (1 ORG) , DISHUB (3 ORANG), KESBANGPOL (3 ORG), BPPID (1 ORG), DPRD (1 ORG), BAPPEDA (3 ORG), DISPORA (8 ORG), DP3A (6 ORANG)
31	ANALIS KETAHANAN PANGAN	6	3	9	0	0	0	9	DINAS PANGAN
32	ANALIS KEUANGAN PUSAT & DAERAH	3	6	9	0	0	0	9	BAPENDA (4 org), BPKAD (2 ORG), RSUD UNDATA (3 ORG)
33	ANALIS PEMANTAPAN IPTEK	5	2	7	0	0	0	7	BRIDA
34	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	1	0	1	0	0	0	1	BPSDM
35	ANALIS PERDAGANGAN	3	2	5	0	0	0	5	DISPERINDAG
36	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	1	1	2	1	0	1	3	DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA
37	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	1		1			0	1	DISKANLUT (1 ORANG)
38	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	-	1	1	-	-	-	1	DISBUNAK
39	ANALIS SDM APARATUR	7	10	17	0	0	0	17	BKD (8 ORG), BPSDM (7 ORG), RSUD UNDATA (2 ORG), INSPEKTORAT (6 ORG)
40	ARSIPARIS	4	5	9	1	1	2	11	DIPUSDA (10 ORANG), RSUD UNDATA (1 ORANG)
41	ASESSOR	4	2	6	0	0	0	6	BKD
42	ASSESSOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG
43	AUDITOR	11	17	28	3	0	3	31	INSPEKTORAT (30 ORG), BKD (1 ORG)

44	INSTRUKTUR	5	2	7	0	2	2	9	DINAS NAKERTRANS
45	INSPEKTUR KELISTRIKAN	2	1	3	0	0	0	3	ESDM
46	MANGGALA INFORMATIKA	1	1	2	0	0	0	2	DISKOMINFO (2 ORANG)
47	MEDIATOR	2	0	2	0	0	0	2	DINAS NAKERTRANS
48	PAMONG BUDAYA	2	1	3	0	0	0	3	DIKBUD
49	P2UPD	24	24	48	0	0	0	48	INSPEKTORAT
50	PELATIH OLAHRAGA	3	0	3	0	0	0	3	DISPORA
51	PEMBINA INDUSTRI	1	4	5	0	0	0	5	DISPERINDAG
52	PEMBINA JASA KONSTRUKSI	1	0	1	0	0	0	1	BINA MARGA
53	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	1	1	0	0	0	1	DISKANLUT (1 ORANG)
54	PENATALAKSANA BARANG	0	0	0	0	0	0	0	BPKAD
55	PENATA KEPENDUDUKAN & KB	7	3	10	0	0	0	10	DUKCAPIL (8 ORG), DP2KB (2 ORG)
56	PENATA KELOLA PERUMAHAN	2	1	3	0	0	0	3	PERKIMTAN
57	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG & KAWASAN PEMUKIMAN	3	4	7	0	0	0	7	PERKIMTAN (6 ORG), CIKASDA (1 ORG)
58	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	1	0	1	0	0	0	1	CIKASDA
59	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL	4	7	11	0	0	0	11	DPMPTSP (11 ORG)
60	PENATA KELOLA SUMBER DAYA AIR	2	0	2	0	0	0	2	CIKASDA
61	PENATA PERIZINAN	0	3	3	0	0	0	3	DPMPTSP (3 ORG)
62	PENATA PERTANAHAN	2	1	3	0	0	0	3	PERKIMTAN
63	PENATA PENANGGULANGGAN BENCANA	3	1	4	0	0	0	4	BPBD
64	PENATA RUANG	1	0	1	0	0	0	1	BINA MARGA
65	PENELITI	0	3	3	0	0	0	3	BRIDA
66	PENGANTAR KERJA	1	0	1	0	0	0	1	DINAS NAKERTRANS
67	PENGAWAS ALAT & MESIN PERTANIAN	2	1	3	0	0	0	3	DISBUNNAK (1 ORG), PERINDAG (9 ORG), DTPH (2 ORG)
68	PENGAWAS BENIH TANAMAN	8	4	12	2	5	7	19	DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN (4 ORANG), DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (15 ORANG)
69	PENGAWAS BIBIT TERNAK	6	1	7	3	0	3	10	DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN
70	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	13	8	21	0	0	0	21	DINAS NAKERTRANS

71	PENGAWAS KOPERASI	2	3	5	0	0	0	5	DINAS KOPERSI & UMKM
72	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	4	5	9	0	0	0	9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
73	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	6	5	11	1	0	1	12	DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (9 ORG), DINAS PANGAN (1 ORG), DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN (2 ORANG)
74	PENGAWAS MUTU PAKAN	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN
75	PENGAWAS PERDAGANGAN	0	2	2	0	0	0	2	DISPERINDAG
76	PENGAWAS PERIKANAN	3	0	3	0	0	0	3	DISKANLUT (3 ORANG)
77	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	1	2	3	0	0	0	3	DISKANLUT (3 ORANG)
78	PENGELOLA PENGADAAN BARANG & JASA	7	6	13	0	0	0	13	RO. PENGADAAN BARANG & JASA (10 ORG), RSUD UNDATA (2 ORANG), BPKAD (1 ORANG)
79	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	3	0	3	0	0	0	3	DISKANLUT (3 ORANG)
80	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	6	5	11			0	11	DISDIK
81	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN	1	1	2	0	0	0	2	DINAS KOPERSI & UMKM
82	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	0	0	0	0	0	0	0	DISHUT
83	PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	17	7	24	15	4	19	43	DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (41 ORANG), DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN (2 ORANG)
84	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
85	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	8	5	13	0	0	0	13	DINAS NAKERTRANS (3 ORANG), PMD (10 ORANG)
86	PENGUJI MUTU BARANG	1	4	5	0	0	0	5	DISPERINDAG
87	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	DISHUB
88	PENYELIDIK BUMI MUDA	4	2	6	0	0	0	6	ESDM
89	PENYULUH PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0	DISKANLUT (3 ORANG)
90	PENYULUH KEHUTANAN	30	22	52	12	1	13	65	DISHUT
91	PENYULUH PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG
92	PENYULUH PERTANIAN	9	13	22	0	0	0	22	DINAS PANGAN (2 ORANG), DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (11 ORANG), DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN (11 ORANG), PERINDAG (3 ORG)
93	PENYULUH SOSIAL	8	3	11	0	0	0	11	DINSOS (11 ORANG), DP3A (10 ORG)
94	PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	2	2	0	0	0	2	DPRD
95	PERENCANA	23	16	39	0	0	0	39	DINSOS (2 ORANG), DISKANLUT (1 ORANG), ESDM (1 ORANG), PMD (1 ORANG), BRIDA (1 ORANG), DISKOMINFO (1ORANG), BAPENDA (1 ORANG), DISHUT (13 ORANG),

									DISPORA (1 ORANG), DISPAR (1 ORG), BPBD (1 org), KESBANGPOL (1 ORG), BPKAD (1ORG), DPRD (1 ORG), BAPPEDA (11 ORG), DTPH (1 ORG), PERINDAG (2 ORG), RSUD UNDATA (1 ORANG), DINKES (1 ORG), DP3A (1 ORANG), DISBUNAK (1 ORANG), DINSOS (1 ORANG)
96	POLISI KEHUTANAN	36	1	37	35	0	35	72	DISHUT
97	POLISI PAMONG PRAJA	2	2	4	19	0	19	23	SATPOL PP
98	PRANATA HUMAS	2	1	3	0	0	0	3	DISKOMINFO
99	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	0	1	1	0	0	0	1	DISKOMINFO (6 ORANG), DPRD (1 ORG)
100	PRANATA KEPENDUDUKAN	0	0	0	0	0	0	0	DP2KB
101	PRANATA KOMPUTER	6	2	8	0	1	1	9	RSUD UNDATA (2 ORANG), BKD (3 ORANG), DISKOMINFO (4 ORANG)
102	PUSTAKAWAN	5	14	19	0	7	7	26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI
103	STATISTISI	2	1	3	0	0	0	3	DISKOMINFO (3 ORANG), DISPERINDAG (1 ORANG)
104	SANDIMAN	0	0	0	0	0	0	0	DISKOMINFO
105	TEKNIK JALAN JEMBATAN	1	0	1	0	0	0	1	BINA MARGA
106	WIDYAISWARA	8	16	24	0	0	0	24	BPSDM (15 ORANG), DINKES (5 ORANG), DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (4 ORANG)
107	**SUB JUMLAH TEKNIS LAINNYA**	353	278	631	92	21	113	744	
T O T A L		**2311**	**3021**	**5332**	**198**	**401**	**599**	**5931**	

Rekap PNS Fungsional Per Bidang Tugas Fungsional

NO	BIDANG JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN						JUMLAH
		AHLI			TERAMPIL			
		P	W	JMLH AHLI	P	W	JMLH TERAMPIL	
1	PENDIDIKAN	1845	2369	4214	0	0	0	4214
2	KESEHATAN	113	374	487	106	380	486	973
3	TEKNIS LAINNYA	353	278	631	92	21	113	744
TOTAL		**2311**	**3021**	**5332**	**198**	**401**	**599**	**5931**

BAB 2
PNS Kabupaten/Kota
Sulawesi Tengah

1. PNS Kab/Kota Perjenis Kelamin

NO.	NAMA KAB/KOTA	APARATUR SIPIL NEGARA				JUMLAH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	Kabupaten Banggai	3083	41%	4377	59%	7460
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	1764	45%	2113	55%	3877
3	Kabupaten Banggai Laut	1101	43%	1467	57%	2568
4	Kabupaten Buol	1916	43%	2591	57%	4507
5	Kabupaten Donggala	2373	40%	3552	60%	5925
6	Kabupaten Morowali	1564	37%	2653	63%	4217
7	Kabupaten Morowali Utara	1553	38%	2521	62%	4074
8	Kabupaten Parigi Moutong	2705	41%	3942	59%	6647
9	Kabupaten Poso	2388	38%	3876	62%	6264
10	Kabupaten Sigi	2108	36%	3746	64%	5854
11	Kabupaten Tojo Una-Una	1668	39%	2622	61%	4290
12	Kabupaten Toli-Toli	2156	41%	3116	59%	5272
13	Kota Palu	1895	31%	4299	69%	6194
T O T A L		**26274**	39%	**40875**	61%	**67149**

2. **ASN di Sulteng Vs Penduduk Sulteng**

NO.	NAMA KAB/KOTA	Jumlah Penduduk	ASN	% ASND ThdpPenduduk
1	Kabupaten Banggai	373.690	7.460	2,00%
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	123.420	3.877	3,14%
3	Kabupaten Banggai Laut	73.100	2.568	3,51%
4	Kabupaten Buol	150.520	4.507	2,99%
5	Kabupaten Donggala	308.310	5.925	1,92%
6	Kabupaten Morowali	170.450	4.217	2,47%
7	Kabupaten Morowali Utara	126.050	4.074	3,23%
8	Kabupaten Parigi Moutong	454.700	6.647	1,46%
9	Kabupaten Poso	251.660	6.264	2,49%
10	Kabupaten Sigi	266.660	5.854	2,20%
11	Kabupaten Tojo Una-Una	169.000	4.290	2,54%
12	Kabupaten Toli-Toli	231.710	5.272	2,28%
13	Kota Palu	387.490	6.194	1,60%
14	Provinsi Sulawesi Tengah	-	14.126	-
T O T A L (ASN Sulawesi Tengah)		**3.086.760**	**80.353**	**2,60%**

***) Jumlah Penduduk bersumber dari Badan Pusat Statistik**

3. **PNS Kab/Kota Pergolongan Ruang**

Golongan Ruang PNS

NO.	NAMA KAB/KOTA	GOLONGAN RUANG												JUMLAH
		I			II			III			IV			
		P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	
1	Kabupaten Banggai	22	2	24	491	360	851	1580	2467	4047	760	876	1636	6558
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	6	1	7	288	202	490	839	1085	1924	342	288	630	3051
3	Kabupaten Banggai Laut	3	0	3	124	140	264	623	840	1463	186	158	344	2074
4	Kabupaten Buol	5	0	5	244	217	461	1091	1438	2529	314	286	600	3595
5	Kabupaten Donggala	41	3	44	596	575	1171	1143	1926	3069	414	406	820	5104
6	Kabupaten Morowali	6	1	7	329	283	612	696	1211	1907	341	292	633	3159
7	Kabupaten Morowali Utara	1	1	2	248	267	515	869	1331	2200	311	352	663	3380
8	Kabupaten Parigi Moutong	19	0	19	548	497	1045	1393	2337	3730	560	579	1139	5933
9	Kabupaten Poso	25	10	35	730	716	1446	1198	2170	3368	349	550	899	5748
10	Kabupaten Sigi	7	0	7	457	335	792	1004	1895	2899	402	586	988	4686
11	Kabupaten Tojo Una-Una	16	2	18	337	382	719	991	1717	2708	217	263	480	3925
12	Kabupaten Toli-Toli	10	2	12	319	290	609	1309	2042	3351	388	400	788	4760
13	Kota Palu	16	2	18	384	458	842	1153	2729	3882	342	1110	1452	6194
TOTAL		**177**	**24**	**201**	**5095**	**4722**	**9817**	**13889**	**23188**	**37077**	**4926**	**6146**	**11072**	**58167**

Golongan Ruang PPPK

NO.	NAMA KAB/KOTA	GOLONGAN RUANG																					JUMLAH
		V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			
		P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	
1	Kabupaten Banggai	10	0	10	0	0	0	20	93	113	0	0	0	194	568	762	6	11	17	0	0	0	902
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	48	9	57	0	0	0	30	85	115	0	0	0	209	438	647	2	5	7	0	0	0	826
3	Kabupaten Banggai Laut	0	0	0	0	0	0	8	44	52	0	0	0	151	266	417	6	19	25	0	0	0	494
4	Kabupaten Buol	23	4	27	0	0	0	44	170	214	0	0	0	175	450	625	20	26	46	0	0	0	912
5	Kabupaten Donggala	0	0	0	0	0	0	36	218	254	0	0	0	139	414	553	4	10	14	0	0	0	821
6	Kabupaten Morowali	3	1	4	0	0	0	46	316	362	0	0	0	127	497	624	16	52	68	0	0	0	1058
7	Kabupaten Morowali Utara	9	7	16	0	0	0	27	150	177	0	0	0	79	384	463	9	29	38	0	0	0	694
8	Kabupaten Parigi Moutong	0	0	0	0	0	0	3	5	8	0	0	0	182	524	706	0	0	0	0	0	0	714
9	Kabupaten Poso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	430	516	0	0	0	0	0	0	516
10	Kabupaten Sigi	0	0	0	0	0	0	75	305	380	0	0	0	152	597	749	11	28	39	0	0	0	1168
11	Kabupaten Tojo Una-Una	0	0	0	0	0	0	14	21	35	0	0	0	93	237	330	0	0	0	0	0	0	365
12	Kabupaten Toli-Toli	25	2	27	0	0	0	24	83	107	0	0	0	79	286	365	2	11	13	0	0	0	512
13	Kota Palu	12	1	13	0	0	0	13	50	63	0	0	0	164	528	692	1	15	16	0	0	0	784
TOTAL		**130**	**24**	**154**	**0**	**0**	**0**	**340**	**1540**	**1880**	**0**	**0**	**0**	**1830**	**5619**	**7449**	**77**	**206**	**283**	**0**	**0**	**0**	**9766**

4. PNS Kab/Kota Berdasarkan Pendidikan

Rekap PNS Per Kategori Pendidikan

NO.	NAMA KAB/KOTA	KATEGORI PENDIDIKAN												JUMLAH
		DASAR & MENENGAH				DIPLOMA				TINGGI				
		P	W	JML	%	P	W	JML	%	P	W	JML	%	
1	Kabupaten Banggai	682	519	1201	18%	233	649	882	13%	1938	2537	4475	68%	6558
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	330	149	479	16%	151	352	503	16%	994	1075	2069	68%	3051
3	Kabupaten Banggai Laut	115	67	182	9%	133	235	368	18%	688	836	1524	73%	2074
4	Kabupaten Buol	319	274	593	16%	200	376	576	16%	1135	1291	2426	67%	3595
5	Kabupaten Donggala	671	453	1124	22%	252	551	803	16%	1271	1906	3177	62%	5104
6	Kabupaten Morowali	411	250	661	21%	97	325	422	13%	864	1212	2076	66%	3159
7	Kabupaten Morowali Utara	333	262	595	18%	101	324	425	13%	995	1365	2360	70%	3380
8	Kabupaten Parigi Moutong	658	416	1074	18%	202	700	902	15%	1660	2297	3957	67%	5933
9	Kabupaten Poso	842	655	1497	26%	149	509	658	11%	1311	2282	3593	63%	5748
10	Kabupaten Sigi	519	333	852	18%	129	493	622	13%	1222	1990	3212	69%	4686
11	Kabupaten Tojo Una-Una	466	359	825	21%	256	799	1055	27%	839	1206	2045	52%	3925
12	Kabupaten Toli-Toli	417	311	728	15%	218	505	723	15%	1391	1918	3309	70%	4760
13	Kota Palu	453	326	779	13%	186	672	858	14%	1256	3301	4557	74%	6194
T O T A L		**6216**	**4374**	**10590**	**18%**	**2307**	**6490**	**8797**	**15%**	**15564**	**23216**	**38780**	**67%**	**58167**

Rincian Rekap PNS Kategori Pendidikan Dasar dan Menengah

NO.	NAMA KAB/KOTA	PENDIDIKAN DASAR & MENENGAH												JUMLAH
		SD/MI				SMP/ST/MTs				SMA/SMK/MA				
		P	W	JML	%	P	W	JML	%	P	W	JML	%	
1	Kabupaten Banggai	9	0	9	1%	27	2	29	2%	646	517	1.163	97%	1.201
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	3	3	6	1%	9	2	11	2%	318	144	462	96%	479
3	Kabupaten Banggai Laut	0	0	0	0%	3	0	3	2%	112	67	179	98%	182
4	Kabupaten Buol	1	1	2	0%	8	2	10	2%	310	271	581	98%	593
5	Kabupaten Donggala	2	0	2	0%	37	4	41	4%	632	449	1.081	96%	1.124
6	Kabupaten Morowali	0	1	1	0%	8	2	10	2%	403	247	650	98%	661
7	Kabupaten Morowali Utara	1	0	1	0%	6	1	7	1%	326	261	587	99%	595
8	Kabupaten Parigi Moutong	11	3	14	1%	9	3	12	1%	638	410	1.048	98%	1.074
9	Kabupaten Poso	10	1	11	1%	23	13	36	2%	809	641	1.450	97%	1.497
10	Kabupaten Sigi	4	2	6	1%	7	0	7	1%	508	331	839	98%	852
11	Kabupaten Tojo Una-Una	8	0	8	1%	19	19	38	5%	439	340	779	94%	825
12	Kabupaten Toli-Toli	4	0	4	1%	13	2	15	2%	400	309	709	97%	728
13	Kota Palu	6	0	6	1%	15	2	17	2%	432	324	756	97%	779
T O T A L		**59**	**11**	**70**	1%	**184**	**52**	**236**	2%	**5973**	**4311**	**10284**	97%	**10590**

Rincian Rekap PNS Kategori Pendidikan Diploma

NO.	NAMA KAB/KOTA	PENDIDIKAN DIPLOMA		
		D I s/d D III		JUMLAH
		P	W	
1	Kabupaten Banggai	233	649	882
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	151	352	503
3	Kabupaten Banggai Laut	133	235	368
4	Kabupaten Buol	200	376	576
5	Kabupaten Donggala	252	551	803
6	Kabupaten Morowali	97	325	422
7	Kabupaten Morowali Utara	101	324	425
8	Kabupaten Parigi Moutong	202	700	902
9	Kabupaten Poso	149	509	658
10	Kabupaten Sigi	129	493	622
11	Kabupaten Tojo Una-Una	256	799	1.055
12	Kabupaten Toli-Toli	218	505	723
13	Kota Palu	186	672	858
T O T A L		**2307**	**6490**	**8797**

Rincian Rekap PNS Kategori Pendidikan Tinggi

NO.	NAMA KAB/KOTA	PENDIDIKAN TINGGI												JUMLAH
		D IV DAN S1				S2				S3				
		P	W	JML	%	P	W	JML	%	P	W	JML	%	
1	Kabupaten Banggai	1.783	2.397	4.180	93,41%	151	139	290	6,48%	4	1	5	0,11%	4.475
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	898	1.010	1.908	92,22%	94	65	159	7,68%	2	0	2	0,10%	2.069
3	Kabupaten Banggai Laut	622	808	1.430	93,83%	65	28	93	6,10%	1	0	1	0,07%	1.524
4	Kabupaten Buol	1.063	1.245	2.308	95,14%	71	45	116	4,78%	1	1	2	0,08%	2.426
5	Kabupaten Donggala	1.214	1.803	3.017	94,96%	53	100	153	4,82%	4	3	7	0,22%	3.177
6	Kabupaten Morowali	749	1.116	1.865	89,84%	115	93	208	10,02%	0	3	3	0,14%	2.076
7	Kabupaten Morowali Utara	908	1.283	2.191	92,84%	87	82	169	7,16%	0	0	0	0,00%	2.360
8	Kabupaten Parigi Moutong	1.493	2.182	3.675	92,87%	166	115	281	7,10%	1	0	1	0,03%	3.957
9	Kabupaten Poso	1.172	2.156	3.328	92,62%	136	123	259	7,21%	3	3	6	0,17%	3.593
10	Kabupaten Sigi	1.031	1.798	2.829	88,08%	189	190	379	11,80%	2	2	4	0,12%	3.212
11	Kabupaten Tojo Una-Una	760	1.153	1.913	93,55%	78	53	131	6,41%	1	0	1	0,05%	2.045
12	Kabupaten Toli-Toli	1.292	1.844	3.136	94,77%	98	72	170	5,14%	1	2	3	0,09%	3.309
13	Kota Palu	1.020	2.895	3.915	85,91%	234	404	638	14,00%	2	2	4	0,09%	4.557
T O T A L		**14005**	**21690**	**35695**	**92,04%**	**1537**	**1509**	**3046**	**7,85%**	**22**	**17**	**39**	**0,10%**	**38780**

Rekap PPPK Per Kategori Pendidikan

NO.	NAMA KAB/KOTA	KATEGORI PENDIDIKAN												JUMLAH
		DASAR & MENENGAH				DIPLOMA				TINGGI				
		P	W	JML	%	P	W	JML	%	P	W	JML	%	
1	Kabupaten Banggai	10	0	10	1%	20	93	113	13%	200	579	779	86%	902
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	48	9	57	7%	30	85	115	14%	211	443	654	79%	826
3	Kabupaten Banggai Laut	0	0	0	0%	8	44	52	11%	157	285	442	89%	494
4	Kabupaten Buol	23	4	27	3%	44	170	214	23%	195	476	671	74%	912
5	Kabupaten Donggala	0	0	0	0%	36	218	254	31%	143	424	567	69%	821
6	Kabupaten Morowali	3	1	4	0%	46	316	362	34%	143	549	692	65%	1058
7	Kabupaten Morowali Utara	9	7	16	2%	27	150	177	26%	88	413	501	72%	694
8	Kabupaten Parigi Moutong	0	0	0	0%	3	5	8	1%	182	524	706	99%	714
9	Kabupaten Poso	0	0	0	0%	0	0	0	0%	86	430	516	100%	516
10	Kabupaten Sigi	0	0	0	0%	75	305	380	33%	163	625	788	67%	1168
11	Kabupaten Tojo Una-Una	0	0	0	0%	14	21	35	10%	93	237	330	90%	365
12	Kabupaten Toli-Toli	25	2	27	5%	24	83	107	21%	81	297	378	74%	512
13	Kota Palu	12	1	13	2%	13	50	63	8%	165	543	708	90%	784
T O T A L		**130**	**24**	**154**	**2%**	**340**	**1540**	**1880**	**19%**	**1907**	**5825**	**7732**	**79%**	**9766**

5. **Rekap PNS Kab/Kota Berdasarkan Jabatan**

Keadaan PNS Berdasarkan Jabatan ASN

NO.	NAMA KAB/KOTA	JENIS JABATAN ASN												JUMLAH	KET
		FUNGSIONAL (JF)				NON FUNGSIONAL (JPT & JA)				PPPK					
		P	W	JML	%	P	W	JML	%	P	W	JML	%		
1	Kabupaten Banggai	1482	2621	4103	55%	1371	1084	2455	33%	230	672	902	12%	7460	-
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	765	1077	1842	48%	710	499	1209	31%	289	537	826	21%	3877	-
3	Kabupaten Banggai Laut	527	845	1372	53%	410	292	702	27%	165	329	494	19%	2568	-
4	Kabupaten Buol	905	1340	2245	0%	749	601	1350	0%	262	650	912	0%	4507	-
5	Kabupaten Donggala	1118	2162	3280	0%	1076	748	1824	0%	179	642	821	0%	5925	-
6	Kabupaten Morowali	629	1369	1998	47%	743	418	1161	28%	192	866	1058	25%	4217	-
7	Kabupaten Morowali Utara	700	1278	1978	49%	729	673	1402	34%	124	570	694	17%	4074	-
8	Kabupaten Parigi Moutong	1107	1820	2927	44%	1413	1593	3006	45%	185	529	714	11%	6647	-
9	Kabupaten Poso	912	2066	2978	48%	1390	1380	2770	44%	86	430	516	8%	6264	-
10	Kabupaten Sigi	870	2069	2939	50%	1000	747	1747	30%	238	930	1168	20%	5854	-
11	Kabupaten Tojo Una-Una	745	1714	2459	57%	816	650	1466	34%	107	258	365	9%	4290	-
12	Kabupaten Toli-Toli	1008	1876	2884	55%	1018	858	1876	36%	130	382	512	10%	5272	-
13	Kota Palu	651	2529	3180	51%	1054	1176	2230	36%	190	594	784	13%	6194	-
TOTAL		**11419**	**22766**	**34185**	**51%**	**12478**	**10720**	**23198**	**35%**	**2377**	**7389**	**9766**	**15%**	**67149**	

Rincian Keadaan PNS Jabatan Struktural

NO.	NAMA KAB/KOTA	JABATAN STRUKTURAL			JENIS KELAMIN PEJABAT STRUKTURAL			DIKLAT PIM			KETERANGAN
		FORMASI	TERISI	LOWONG	PRIA	WANITA	JMLH	SDH PIM	BLM PIM	JMLH	
1	Kabupaten Banggai	787	730	57	285	445	730	285	445	730	-
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	466	436	30	264	172	436	0	0	0	detail tidak ada
3	Kabupaten Banggai Laut	375	295	80	178	117	295	178	117	295	-
4	Kabupaten Buol	402	378	24	243	135	378	0	0	0	detail tidak ada
5	Kabupaten Donggala	0	534	-	345	189	534	0	0	0	detail tidak ada
6	Kabupaten Morowali	405	361	44	218	143	361	0	0	0	detail tidak ada
7	Kabupaten Morowali Utara	342	307	35	199	108	307	16	291	307	
8	Kabupaten Parigi Moutong	620	562	58	345	217	562	128	434	562	
9	Kabupaten Poso	617	532	85	308	224	532	384	148	532	
10	Kabupaten Sigi	428	365	63	256	109	365	190	175	365	
11	Kabupaten Tojo Una-Una	505	459	46	288	171	459	194	265	459	
12	Kabupaten Toli-Toli	524	524	0	350	174	524	221	303	524	
13	Kota Palu	611	568	43	304	264	568	1	556	557	
TOTAL		**6082**	**6051**	**565**	**3583**	**2468**	**6051**	**1597**	**2734**	**4331**	

***) Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Morowali tidak memasukkan data Pejabat Struktural yang sudah melaksanakan PIM dan yang belum melaksanakan PIM.**

***) Kabupaten Donggala tidak melampirkan total formasi Jabatan Struktural.**

NO.	NAMA KAB/KOTA	ESELONISASI JABATAN STRUKTURAL							PENDIDIKAN PEJABAT STRUKTURAL						KET
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	JMLH	SMA/SMK	D.I - D.III	SI / D.IV	S2	S3	JMLH	
1	Kabupaten Banggai	1	34	79	152	298	166	730	35	10	588	96	1	730	-
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	34	43	112	206	40	436	4	17	315	98	2	436	-
3	Kabupaten Banggai Laut	1	22	43	90	117	22	295	3	6	225	61	0	295	-
4	Kabupaten Buol	1	29	50	100	150	48	378	0	2	325	49	2	378	-
5	Kabupaten Donggala	1	38	62	131	229	73	534	38	17	339	131	9	534	-
6	Kabupaten Morowali	1	46	22	95	100	97	361	1	49	232	77	2	361	-
7	Kabupaten Morowali Utara	1	30	35	89	131	21	307	4	10	237	56	0	307	-
8	Kabupaten Parigi Moutong	1	22	71	133	270	65	562	7	13	424	117	1	562	-
9	Kabupaten Poso	1	24	60	113	213	121	532	20	10	385	114	3	532	
10	Kabupaten Sigi	1	30	56	92	136	50	365	13	1	234	115	2	365	-
11	Kabupaten Tojo Una-Una	1	23	53	86	223	73	459	33	21	341	63	1	459	-
12	Kabupaten Toli-Toli	1	34	69	134	229	57	524	13	16	429	65	1	524	-
13	Kota Palu	1	38	47	105	165	212	568	21	7	359	179	2	568	-
TOTAL		**13**	**404**	**690**	**1432**	**2467**	**1045**	**6051**	**192**	**179**	**4433**	**1221**	**26**	**6051**	

Rincian Keadaan PNS Jabatan Fungsional

NO.	NAMA KAB/KOTA	JENIS JABATAN FUNGSIONAL												JUMLAH	Ket
		KESEHATAN (Dokter, Perawat, Bidan, Dll)				PENDIDIKAN (GURU)				LAINNYA (Penyuluh Pertanian, Dll)					
		P	W	JML	%	P	W	JML	%	P	W	JML	%		
1	Kabupaten Banggai	189	817	1006	25%	962	1557	2519	61%	331	247	578	14%	4103	
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	74	298	372	20%	564	684	1248	68%	127	95	222	12%	1842	
3	Kabupaten Banggai Laut	110	331	441	32%	319	421	740	54%	98	93	191	14%	1372	
4	Kabupaten Buol	138	373	511	0%	547	805	1352	0%	220	162	382	0%	2245	
5	Kabupaten Donggala	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	3280	Rincian tidak ada
6	Kabupaten Morowali	77	447	524	26%	387	790	1177	59%	165	132	297	15%	1998	
7	Kabupaten Morowali Utara	105	396	501	25%	463	767	1230	62%	132	115	247	12%	1978	
8	Kabupaten Parigi Moutong	72	223	295	10%	838	1418	2256	77%	197	179	376	13%	2927	
9	Kabupaten Poso	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2978	Rincian tidak ada
10	Kabupaten Sigi	71	566	637	22%	604	1325	1929	66%	195	178	373	13%	2939	
11	Kabupaten Tojo Una-Una	110	478	588	24%	488	1088	1576	64%	147	148	295	12%	2459	
12	Kabupaten Toli-Toli	151	599	750	26%	527	1018	1545	54%	330	259	589	20%	2884	
13	Kota Palu	118	741	859	27%	362	1602	1964	62%	171	186	357	11%	3180	
TOTAL		**1215**	**5269**	**6484**	**19%**	**6061**	**11475**	**17536**	**51%**	**2113**	**1794**	**3907**	**11%**	**34185**	

***) Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso tidak memasukkan rincian daftar nama Jabatan Fungsional, hanya melampirkan total Keseluruhan Jabatan Fungsional.**

NO.	NAMA KAB/KOTA	KATEGORI JF	JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN						JMLH AHLI + TERAMPIL	Ket
			AHLI		JMLH AHLI	TERAMPIL		JMLH TERAMPIL		
			P	W		P	W			
1	Kabupaten Banggai	Pendidik	1557	962	2519	0	0	0	2519	
		Kesehatan	273	70	343	544	119	663	1006	
		Teknis Lainnya	247	331	578	0	0	0	578	
	Jumlah Kab. Banggai		**2077**	**1363**	**3440**	**544**	**119**	**663**	**4103**	
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	Pendidik	119	92	211	8	3	11	222	
		Kesehatan	56	278	334	18	20	38	372	
		Teknis Lainnya	470	612	1082	94	72	166	1248	
	Jumlah Kab. Banggai Kepulauan		**645**	**982**	**1627**	**120**	**95**	**215**	**1842**	
3	Kabupaten Banggai Laut	Pendidik	272	377	649	47	44	91	740	
		Kesehatan	42	150	192	68	181	249	441	
		Teknis Lainnya	92	91	183	6	2	8	191	
	Jumlah Kab. Banggai Laut		**406**	**618**	**1024**	**121**	**227**	**348**	**1372**	
4	Kabupaten Buol	Pendidik	541	793	1334	6	12	18	1352	
		Kesehatan	59	143	202	79	230	309	511	
		Teknis Lainnya	203	149	352	17	13	30	382	
	Jumlah Kab. Buol		**803**	**1085**	**1888**	**102**	**255**	**357**	**2245**	
5	Kabupaten Donggala	Pendidik	-	-	-	-	-	-	-	**Rincian tidak ada**
		Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	
		Teknis Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Kab. Donggala		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3280**	
6	Kabupaten Morowali	Pendidik	387	790	1177	0	0	0	1177	
		Kesehatan	36	189	225	41	258	299	524	
		Teknis Lainnya	152	128	280	13	4	17	297	
	Jumlah Kab. Morowali		**575**	**1107**	**1682**	**54**	**262**	**316**	**1998**	
7	Kabupaten Morowali	Pendidik	455	759	1214	8	8	16	1230	

	Utara	Kesehatan	62	170	232	43	226	269	501	
		Teknis Lainnya	104	106	210	28	9	37	247	
	Jumlah Kab. Morowali Utara		**621**	**1035**	**1656**	**79**	**243**	**322**	**1978**	
8	Kabupaten Parigi Moutong	Pendidik	838	1418	2256	0	0	0	2256	
		Kesehatan	41	132	173	31	91	122	295	
		Teknis Lainnya	185	164	349	12	15	27	376	
	Jumlah Kab. Parigi Moutong		**1064**	**1714**	**2778**	**43**	**106**	**149**	**2927**	
9	Kabupaten Poso	Pendidik	-	-	-	-	-	-	-	**Rincian tidak ada**
		Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	
		Teknis Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Kab. Poso		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2978**	
10	Kabupaten Sigi	Pendidik	604	1325	1929	0	0	0	1929	
		Kesehatan	36	193	229	35	373	408	637	
		Teknis Lainnya	168	151	319	27	27	54	373	
	Jumlah Kab. Sigi		**808**	**1669**	**2477**	**62**	**400**	**462**	**2939**	
11	Kabupaten Tojo Una-Una	Pendidik	467	1061	1528	21	27	48	1576	
		Kesehatan	39	108	147	71	370	441	588	
		Teknis Lainnya	124	121	245	23	27	50	295	
	Jumlah Kab. Tojo Una Una		**630**	**1290**	**1920**	**115**	**424**	**539**	**2459**	
12	Kabupaten Toli-Toli	Pendidik	498	970	1468	29	48	77	1545	
		Kesehatan	50	212	262	101	387	488	750	
		Teknis Lainnya	290	245	535	40	14	54	589	
	Jumlah Kab. Toli Toli		**838**	**1427**	**2265**	**170**	**449**	**619**	**2884**	
13	Kota Palu	Pendidik	362	1602	1964	0	0	0	1964	
		Kesehatan	101	664	765	17	77	94	859	
		Teknis Lainnya	168	183	351	3	3	6	357	
	Jumlah Kota Palu		631	2449	3080	20	80	100	**3180**	
TOTAL			**9098**	**14739**	**23837**	**1430**	**2660**	**4090**	**34.185**	

BAB 3

Penutup

1. Kesimpulan

a. ASN Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 berjumlah 14.126 dengan rincian 10.654 PNS dan 3472 PPPK. Jumlah ASN Wanita 7814 orang, lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah ASN Pria 6312 orang. Berdasarkan jenis Jabatan masing-masing berjumlah 821 untuk Pejabat Struktural, 9374 Untuk Pejabat Fungsional dan 3902 untuk Pejabat Pelaksana. ASN Sulteng mayoritas bergolongan ruang III serta berpendidikan Tinggi (Jenjang S1-S3).

b. Formasi Jabatan Struktural lingkup Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 838 formasi. Pada akhir desember 2023 ini jumlah jabatan yang terisi sebanyak 821 jabatan dan jabatan kosong sebanyak 17 jabatan.

c. Terdapat 106 jabatan fungsional di Provinsi Sulawesi Tengah yang didominasi oleh JF jenjang Ahli Madya yang juga didominasi oleh Wanita. Sedangkan pejabat Fungsional Terbanyak di Prov. Sulteng masih dengan Jabatan Guru.

d. Jumlah ASN Kab/Kota di Sulawesi Tengah mencapai 67.149 yang 60% adalah wanita dan 40% adalah pria. Mayoritas ASN Kab/Kota Bergolongan III dan Berpendidikan Tinggi pada jenjang S1-S3. ASN yang berpendidikan S3 pada Kab/Kota mengalami peningkatan dari yang tahun 2022 berjumlah 33 orang, bertambah menjadi 39 orang pada tahun 2023

e. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Sulawesi Tengah, Profesi ASN di Pemprov/Pemkab/Pemkot hanya sebesar 2,60% dari Total penduduk **3.086.760** berbanding ASN Pemprov/Pemkab/Pemkot **80.353.**

2. Saran

a. Dorongan kepada ASN untuk melanjutkan pendidikan perlu diperbesar, utamanya ke jenjang S3 baik dalam maupun luar negeri. Kerjasama antara pemda dan lembaga/instansi penyelenggara pendidikan atau penyedia beasiswa hendaknya dibangun dan dibangun dan dikongkritkan secara nyata.

b. Pejabat struktural yang berpendidikan SMA perlu diperhatikan mengingat regulasi yang ada saat ini mensyaratkan bahwa jabatan struktural berpendidikan minimal diploma.

c. Jumlah ASN Kab/Kota yang berpendidikan tinggi sudah mencapai 67% akan tetapi pemkab/pemkot masih harus terus merangsang para ASNnya untuk melanjutkan ke pendidikan Tinggi agar dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN serta sebafai sarana untuk menambah wawasan dan membangun jaringan baru yang tentunya akan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai ASN yang professional.

d. Pendokumentasian Data dan Informasi seperti ini tetap perlu dilakukan setiap tahunnya.

Produksi

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG PENGADAAN PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

2023

SULAWESI TENGAH